

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: SURAT KETERANGAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
UNIVERSITAS PERTAHANAN**

Nomor : B/ 224 /IX/2017
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Lembar.
Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Permintaan Data

Bogor, 12 September 2017

Kepada
Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di
Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah.
 - b. Kalendar Akademik Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan TA. 2016/2017.
2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Megawati Rosalio Putri NIM: 120160205015, nomor HP: 081373364078, email: rosalioputri@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Efektivitas Peran *Indian Ocean Rim Association (IORA)* Guna Menjaga Keamanan Maritim Kawasan Dari Perspektif Indonesia".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian mohon menjadi periksa.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I. Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,


Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Ka LP2M Unhan
3. Karo Aka Unhan.

Kawasan IPSC Sentul Bogor. Telepon 021-29618766

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/ 2214 /IX/2017
Tanggal : 12 , September 2017

DAFTAR NAMA PEJABAT

1. Plt. Direktur Jenderal Multilateral, Direktorat Jenderal Kerja sama Multilateral Kemlu RI.
2. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI.
3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.
4. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan RI.
5. Kepala Staf Angkatan Laut, Markas Besar TNI Angkatan Laut.
6. Asops Kasal, Markas Besar TNI Angkatan Laut.
7. Asrena Kasal, Markas Besar TNI Angkatan Laut.
8. Dr. Adriana Elisabeth, M.Sos.Sc., IORA Focal Point Indonesia, Pusat Penelitian Politik LIPI.
9. Prof. Dewi Fortuna Anwar, MA., Pusat Penelitian Politik LIPI.
10. Drs. Japanton Sitohang, MA., Pusat Penelitian Politik LIPI.
11. Firdaus Dahlan, Director IORA Secretariat, Indian Ocean Rim Association.
12. Prof. Dennis Rumley, Indian Ocean Research Group Inc., Curtin University Australia.
13. Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D. sebagai Pakar Kemaritiman Indonesia.
14. Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, M.M. sebagai Pakar Kemaritiman Indonesia.
15. Prof. Hasyim Djalal sebagai Pakar Kemaritiman Indonesia.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek / Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng
Pembina Utama IV/e

LAMPIRAN 2: PEDOMAN WAWANCARA

Bagaimana efektivitas peran IORA terhadap keamanan maritim di Samudera Hindia?

- a. Bagaimana kepentingan negara anggota IORA dalam perwujudan keamanan maritim Samudera Hindia?
- b. Apa visi dan misi IORA terhadap kawasan Samudera Hindia?
- c. Seberapa signifikan peran IORA di kawasan Samudera Hindia?
- d. Bagaimana performa IORA selama 20 tahun belakang?
- e. Bagaimana kondisi keamanan kawasan Samudera Hindia?
- f. Kejahatan dan/atau ancaman yang terjadi di kawasan Samudera Hindia?
- g. Bagaimana pengaruh perbedaan latar belakang negara-negara IORA dalam kondisi keamanan maritim kawasan?
- h. Apa hambatan IORA dalam mencapai keamanan kawasan?
- i. Bagaimana peran IORA dalam menjaga keamanan maritim kawasan?
- j. Mengapa baru di tahun 2017 IORA memiliki hasil dokumen yang menjabarkan kepentingan IORA di kawasan?
- k. Apakah sudah dibentuk *blue print* sebagai landasan program dan strategi untuk menyukseskan visi IORA dalam Jakarta Concord?
- l. Mengapa IORA memandang pentingnya menjaga keamanan maritim kawasan (dalam Jakarta Concord poin 16.1)?
- m. Bagaimana hubungan IORA dengan organisasi terkait keamanan kawasan Samudera Hindia?
- n. Negara apa saja yang mempengaruhi kondisi kawasan Samudera Hindia (di luar negara-negara pantai di kawasan)?
- o. Bagaimana peran IONS dalam mengadakan forum komunikasi pertahanan dan keamanan kawasan?
- p. Bagaimana urgensi membangun integrasi antara IORA dan IONS untuk mencapai keamanan maritim kawasan Samudera Hindia?
- q. Bagaimana IORA menggandeng negara-negara di luar kawasan namun berpengaruh dalam geopolitik Samudera Hindia?

- r. Seberapa penting membentuk kebijakan keamanan kawasan dengan menggandeng IONS dan negara-negara di luar kawasan (pengguna Samudera Hindia)?
- s. Apa kesulitan keluaran / hasil dari pertemuan IORA untuk diimplementasikan?
- t. Bagaimana seharusnya IORA menjadikan hasil pertemuannya / kebijakannya menjadi *legally binding* untuk negara-negara anggota IORA, kawasan Samudera Hindia, bahkan aktor-aktor yang kemungkinan berpengaruh dalam geopolitik kawasan?

Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap keamanan maritim kawasan Samudera Hindia dan kepemimpinan di IORA?

- a. Apa saja kepentingan Indonesia dalam Samudera Hindia?
- b. Bagaimana Indonesia mampu memainkan peran signifikan dalam kawasan Samudera Hindia?
- c. Bagaimana Indonesia mampu memainkan peran signifikan dalam IORA?
- d. Bagaimana kemampuan Indonesia mengelola ruang maritimnya di kawasan Samudera Hindia?
- e. Apa saja pemikiran yang bisa Indonesia sampaikan sebagai masukan untuk IORA dalam menjaga keamanan maritim kawasan?

LAMPIRAN 3: TRANSKRIP WAWANCARA

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Sekretariat Pusat <i>Indian Ocean Rim Association (IORA)</i>	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Dr. Firdaus Dahlan	<u>Jabatan:</u> Direktur Sekretariat IORA Pusat
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> <i>Online Interview: Indonesia – Mauritius</i>	<u>Waktu:</u> Rabu, 25 Oktober 2017 Pukul 21.00 WIB – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Bagaimana kondisi Samudera Hindia dan peran Jakarta Concord dalam isu keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Kita tahu bahwa Samudera Hindia adalah jalur perdagangan dunia tersibuk dan pentingnya menjaga keamanan maritim di kawasan untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi. Tentang keamanan maritim di Samudera Hindia penting karena akan sangat kondusif untuk melakukan pembangunan di masing-masing negara anggota IORA. Itu yang pertama, yang kedua perlu diingat ada tujuh negara nuklir ada di Samudera Hindia. Bayangkan kalau kita negara anggota IORA tidak mempunyai komitmen untuk memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan Samudera Hindia, it matters of time. Jadi Jakarta Concord itu mempunyai makna yang sangat penting bagi masa depan IORA.*

P : *Ketika seluruh negara anggota IORA memiliki komitmen untuk menjaga keamanan maritim kawasan, apakah perbedaan latar belakang dari mereka yang membentuk gap perkembangan perekonomian yang besar mempengaruhi? Bagaimana peran IORA untuk menghadapi gap tersebut?*

I : *IORA itu sangat beragam dari perkembangan ekonomi negaranya. Ada negara maju, berkembang, dan sedang berkembang. Kalau kita lihat ada*

negara yang sudah maju / *high income countries* ada juga tujuh negara sedang berkembang yang perlu kita tarik ke atas untuk dapat pelan-pelan naik kesejahteraan seperti negara IORA lainnya.

Apa yang dilakukan di IORA ini adalah pembangunan *capacity building* karena negara berkembang apalagi negara sedang berkembang tidak mempunyai kapasitas (*capacity*), itulah yang harus dibangun, sumber dayanya dibangun. Karena dengan sumber daya yang baik, orang akan bisa membuat ekonomi baik didukung oleh negara maju dan berkembang (yang memiliki kapasitas).

Dalam IORA ada enam pilar kerjasama, yaitu pilar keamanan dan keselamatan maritim, perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, manajemen bencana, akademik dan teknologi, dan pariwisata, ditambah dua fokus kerjasama yaitu *blue economy* dan *women empowerment*. Kalau kita lihat negara IORA, seperti Indonesia misalkan, kita memiliki kapasitas di manajemen perikanan dan *aquaculture* yang diakui dunia. Dan kita di region IORA jauh lebih baik dari yang lain. Apa yang bisa dilakukan adalah Indonesia bisa memberi kontribusi ilmu pada negara sedang berkembang, itu yang disebut *capacity building program*. Di IORA ada beberapa program kerjasama dilakukan dalam *capacity building program* yang pendanaannya bisa dibantu IORA, namanya IORA *Special Fund*. Itu adalah dana dari IORA yang dapat digunakan oleh negara IORA untuk proyek kerjasama.

P : Untuk keluaran dari pertemuan IORA sifatnya tidak *legally binding*, hanya *morally binding*, apa kesulitan IORA mengeluarkan peraturan yang bersifat mengikat anggotanya?

I : Pada saat kita melakukan Summit Maret 2017 lalu, Indonesia mengusulkan Jakarta Concord adalah dokumen yang *legally binding*. Tetapi untuk mendapatkan kesepakatan yang *legally binding* di IORA ini tidak gampang. Ada satu hal yang perlu dicatat, kalau makin banyak anggota di organisasi itu maka kesepakatan itu semakin sulit diambil keputusan. Apalagi geografisnya sangat luas dan budaya yang sangat beragam sangat sulit mengambil satu kesepakatan apalagi *legally binding*, butuh waktu. Pemahaman kita dalam suatu konsep oleh negara Afrika dibanding negara ASEAN itu beda, mungkin kita di ASEAN itu cepat, di Afrika sulit mencerna dokumen ini akan diapakan (berhubungan dengan parlemen, dll). Level pemahaman yang tidak sama itu harus dipahami. Maka dari itu untuk membuat dokumen yang *legally binding* takes time, namun bukan tidak mungkin.

P : Saat berbicara keamanan maritim, mau tidak mau akan bersinggungan dengan navy, dimana di Samudera Hindia sudah terdapat IONS sebagai mitra IORA. Apakah IORA mengadakan forum komunikasi khusus dengan IONS?

I : Kembali ke IORA Charter, IORA tidak mengadakan kerjasama bidang pertahanan dan politik. Tapi kita tidak tau kedepannya seperti apa, mungkin akan terjadi nuansa perubahan baru lima hingga sepuluh tahun kedepan. Kenapa kerjasama pertahanan di IORA ini tidak ada selama ini karena ada *sensitivity* saat dibentuk IORA dulu misalnya akan

menimbulkan tantangan. Yang kita lakukan dalam konteks keamanan selama ini kita punya Indian Ocean Dialogue, sebatas dialog bagaimana menciptakan keamanan dan capacity building.

Sebagian besar anggota IONS adalah anggota IORA, walau belum sepenuhnya. Dalam IOD ketiga di Padang, ada rekomendasi member states untuk ada kerjasama yang lebih intensif dengan IONS. Namun kita mengacu ke referensi, kerjasama bidang keamanan dalam hal angkatan laut belum ada referensinya. Kalau concern iya, terutama non-tradisional.

P : Siapa saja yang hadir dalam IOD?

I : IOD adalah tingkat expert, bukan pemerintahan. Ini adalah 1.5 Track, yaitu ada pemerintah, think tank, akademisi. Expert ini bisa dari mana saja. Di IOD Padang kemarin juga melibatkan TNI Angkatan Laut (berbicara mengenai keamanan dan keselamatan di laut) sebagai narasumber.

P : Sekarang kepemimpinan IORA sudah berada di tangan Afrika Selatan. Setelah Indonesia selesai dalam kepemimpinan apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjaga eksistensi dan pengaruh di kawasan?

I : Selama kepemimpinan Indonesia 2 tahun semua negara IORA mengakui ini adalah achievement terbaik IORA selama 20 tahun, hal ini menjadi catatan khusus. Pada saat Indonesia menjadi Ketua lah IORA baru mengadakan Summit, ada sekitar 15 Kepala Negara juga hadir. Outcome dari Summit itu juga luar biasa (Jakarta Concord dan Action Plan) yang baru ada saat Indonesia menjabat. Selama ini kerjasama IORA tidak ada Action Plan yang jelas bagaimana kedepannya IORA berjalan. Action Plan ini akan menjadi guideline. Sudah jelas apa yang akan dilakukan jangka pendek, menengah, dan panjang. Walau sudah tidak sebagai Ketua, Indonesia harus mengawal aksi kongkrit dari Action Plan tersebut. Fokus pada implementasi IORA Action Plan tersebut yang bermanfaat dan bisa dirasakan. Indonesia belum selesai kerjanya, harus mengimplementasikan. Indonesia statusnya sebagai Past Chair tugasnya mengawal bagaimana berjalannya kinerja IORA.

P : Bagaimana pandangan Bapak terhadap peran IORA kedepannya sebagai organisasi regional Samudera Hindia?

I : Optimis negara-negara IORA dalam perkembangan IORA kedepan, dalam kepemimpinan Indonesia negara LCD dapat mengembangkan ekonomi dengan menjadi host dari kegiatan IORA, negara-negara besar sebagai mitra IORA pun berharap perkembangan IORA kedepannya karena dapat juga membantu mereka dalam bekerja sama di IOR

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Hukum & Perjanjian Internasional – Subdit Batas Maritim	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Dr. Taufan	<u>Jabatan:</u> Subdit Batas Maritim Dirjen Hukum & Perjanjian Internasional
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Kementerian Luar Negeri RI	<u>Waktu:</u> Selasa, 10 September 2017 Pukul 10.51 – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : Kalau dari pembentukan (penyusunan) perjanjian, saya baca di website Kemlu salah satu dari tugas dan fungsi dari HPI (Dirjen Hukum & Perjanjian Internasional Kemlu) untuk menentukan kriteria, pedoman, dan standar; apalagi ketika ikut dalam (penyusunan) Jakarta Concord, kriteria dalam penyusunan dokumen (perjanjian) dari organisasi internasional itu apa?

I : Iya, yang pertama (kriteria) biasanya kita melihat rujukan pada hukum internasional dan nasional. Jadi ketika kita menyusun suatu perjanjian itu kita memastikan bahwa isi dari perjanjian itu bahkan sampai prosedurnya itu sesuai dengan hukum internasional yang ada yang terkait dan hukum nasional.

Kongkritnya misalnya di dalam penyusunan suatu kerjasama, perjanjian tentang kerjasama maritim, tadi yang saya sebutkan ada UNCLOS, Marpol (maritime / marine policy), kalau memang terkait dengan SOLAS, atau konvensi lainnya macam-macam ada tentang lingkungan karena kita menjadi party (pihak) dari konvensi-konvensi yang ada. Jadi (dapat dilihat) sesuai atau tidak dengan isinya. Biasanya, secara umum kalau sudah sesuai kita lanjutkan. Jangan sampai ada yang bertentangan dari isi perjanjian yang akan kita buat dengan hukum internasional yang ada. Termasuk juga dari customary international, karena sumber hukum kan

tidak hanya konvensi.

Selain itu juga ada hukum nasional, ini karena perspektifnya hukum ya. Jadi misalnya ada Undang-undang Kelautan, Undang-undang Wilayah Negara, Undang-undang Perlindungan Lingkungan Hidup, (dan) banyak ada yang lainnya itu kita pastikan perjanjian yang kita buat itu sesuai dengan Undang-undang yang ada. Tidak bertentangan.

P : *Itu misalnya perjanjiannya mungkin bilateral, kalau yang mencakup banyak negara kan kepentingannya banyak, itu bagaimana menemukan satu benang merah?*

I : *Kalau dari perspektif hukum ya, itu sama, baik bilateral, regional, maupun multilateral, kepentingannya memang kepentingan umum. Nanti memang ada kepentingan praktis; kepentingan praktis ini memang yang lebih tau adalah dari segi instansi teknis misalkan kepentingan perdagangan, terus juga ada transportasi, pembangunan infrastruktur, kalau politis regional memang dari bawah ya jadi memang kita mau kerjasama dengan siapa saja misalnya Jepang, Cina, atau yang lain itu secara politis regional. Kepentingan apa yang diinginkan kalau kita lihatnya dari segi hukum.*

P : *Kalau kemarin dalam penyusunan Jakarta Concord itu sendiri pertimbangan yang paling besar dan ingin dititikberatkan itu di poin apa?*

I : *Kemarin yang sudah dilakukan memang sudah sesuai dengan hukum internasional, konvensi-konvensi yang ada, dan hukum nasional. Dan memang sering kali yang diatur oleh hukum internasional bersifat general (umum). Sedangkan perjanjian regional atau bilateral biasanya lebih spesifik, oleh karena itu sepanjang tidak bertentangan kita bisa saja membuat apa yang kita perlukan.*

Dari Jakarta Concord kan penekanannya tadi misalnya kita membuka kerjasama di bidang perdagangan, jasa, juga keamanan maritim dengan negara-negara di kawasan Samudera Hindia.

P : *Dalam perumusannya, melibatkan 21 negara itu seperti apa?*

I : *Iya jadi sebelum masuk kesana kita biasanya ada delegasi RI, itu juga didahului dengan rapat-rapat antar Kementerian. Rapat ini banyak*

(melibatkan) dari Kemlu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, TNI AL, semuanya ikut lah yang berkepentingan. Disitu dibicarakan (secara nasional).

Kemlu pun kita ada (bagian) hukumnya da nada juga yang regional. Nanti setelah pertemuan, dalam sidang pun kita ada beberapa orang, jadi tidak hanya satu orang, kita ada Tim yang terdiri dari Ketua Delegasi dan Anggota Delegasi. Anggota Delegasi juga bisa dari beberapa Instansi / Kementerian.

P : *Tapi delegasi ini tetap dipimpin oleh Kemlu, ya?*

I : *Iya, betul. Sebagai Ketua Delegasinya. Disitu kita menyampaikan (pandangan), teknisnya itu kan kita menyampaikan draft Jakarta Concord paragraf sekian apakah sudah sesuai dan dapat diterima oleh negara lain. Biasanya pembahasannya sendiri sudah lancar karena sudah didahului (pertemuan lain) karena prosesnya sudah panjang sebelumnya. Draft itu sudah diberikan ke negara-negara lain, negara-negara yang memberikan masukan (penambahan dan koreksi).*

P : *Kalau di TNI AL biasanya yang in charge (terlibat) dalam hal ini bagian apa? Apakah langsung Kepala Staff Khususnya?*

I : *TNI AL bisa yang dikirim itu biasanya Asisten Operasi, atau Asisten Strategis, atau Direktorat Hukum. Disitu mereka bisa memberikan masukan kerjasama pertahanan antar negara-negara IORA.*

P : *Karena memang point 16.1 nya berbicara mengenai keamanan dan keselamatan maritim jadi bukan semata-mata hanya dari Kemlu saja, ya?*

I : *Tidak, malah kita nanti yang meminta TNI AL tanggapan dan pandangan mengenai paragraph 16.1 ini. Itu dilakukan sebelum. Saat masih berbentuk draft.*

P : *Dan Jakarta Concord ini masuknya ke kesepakatan (MoU) yang bersifat moral biding.*

I : *Iya betul. Negara-negara juga cenderungnya juga memilih bentuk seperti*

ini untuk menghindari keterikatan secara hukum, yang mengharapkan sedikit lebih fleksibel karena ada kekhawatiran di dalam negeri ada kejadian yang tidak sesuai.

P : *Apakah tingkatan moral binding ini tidak menjadikan semua keluaran IORA menjadi lemah?*

I : *Itu (Jakarta Concord dan dokumen keluaran IORA) memang statusnya di bawah treaty atau agreement, tapi bukan berarti lemah dan tidak dijalankan karena merupakan sebuah komitmen dan harus dilaksanakan antar negara. Ini juga dipilih karena mereka menghindari treaty atau agreement jadi dalam prakteknya suatu kerjasama aka nada kesepakatan. Saat disampaikan hal ini berupa treaty atau agreement biasanya negara-negara akan mundur, termasuk juga mungkin Indonesia, karena konsekuensinya berat.karena harus ratifikasi, kalau tidak melaksanakan ada sengketa, memakan waktu, prosedurnya lama, maka dibuat MoU. Namun tetap harus dilaksanakan karena bentuknya komitmen. Yang konsekuensinya berupa praktis. Yang dipantau bersama serta pada secretariat pusat.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Dr. Adlina Fauziah	<u>Jabatan:</u> Staff Kemlu – Tim IORA
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Kementerian Luar Negeri RI	<u>Waktu:</u> 3 November 2017 Pukul 14.00 – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Apakah keberadaan IORA di kawasan Samudera Hindia ini signifikan?*

I : *Memang dari perkembangannya, IORA ini cukup pelan, dilihat dari anggotanya yang berbeda latar belakang memiliki fokus masing-masing. Dari awal Charter tujuan awalnya memajukan ekonomi, hal ini masih terus diangkat oleh negara anggota dalam forum IORA apapun. Kemudian berkembang saat India menjadi Ketua dibentuk Fokus Area Kerjasama karena melihat kawasan Samudera Hindia sudah banyak kepentingannya bukan hanya ekonomi. Eksistensi IORA ditentukan juga oleh keaktifan Ketua. Saat Australia menjadi Ketua menambah 2 fokus yaitu Blue Economy dan Women Empowerment. Memang terlihat perlahan apabila dibandingkan organisasi lain. Saat Indonesia menjadi Ketua, lebih ditingkatkan lagi karena melihat visibilitas organisasi yang rendah bahkan di negara-negara anggota sendiri. Indonesia mengusulkan komitmen IORA perlu ditingkatkan ke level yang lebih tinggi yaitu pertemuan Kepala Negara. Dengan adanya KTT yang digagas oleh Indonesia maka menaikkan posisi IORA di dunia.*

P : *Apa yang menyebabkan IORA lambat berkembang selama 20 tahun belakangan?*

I : *Tradisi Chair-Driven harusnya dapat meningkatkan eksistensi IORA secara kontinyuitas. Namun tantangan organisasi secara internal juga menghambat. Berbeda kepentingan, latar belakang sosial budaya,*

ekonomi, dan politik. IORA memiliki anggota yang merupakan anggota G20 dan negara yang tergolong LDC (Less Develop Country). IORA bisa berkembang apabila Ketuanya aktif, misalnya Ketua (negara) memiliki dana yang sedikit akan berimbang pada minimnya pertemuan anggota IORA. Menjadi Ketua di IORA dengan cara mengajukan diri.

P : *Bagaimana kepemimpinan Indonesia di IORA?*

I : *Selama ini Indonesia dipandang sebagai Ketua yang paling baik kinerjanya dengan dana yang cukup, inisiatif tinggi, substansi bagus, dan mau bekerja langsung.*

P : *Salah satu poin prioritas IORA tentang Keamanan Maritim, apakah dalam implementasinya sudah dilaksanakan?*

I : *Apabila suatu isu sudah dijadikan area prioritas, maka sudah dilakukan kegiatan terkait isu tersebut. Misalnya dalam isu ini diadakan expert meeting on maritime security and safety. Salah satunya inisiatif Indonesia di Jakarta Concord untuk keaktifan negara dalam isu ini. Jakarta Concord didorong oleh Action Plan yang berfungsi untuk mendorong dalam target menjalankan program. Untuk saat ini penguatan kerjasama fokus dalam pembentukan working group, yang mungkin selanjutnya dapat berlanjut hal-hal yang lebih tinggi.*

P : *Seberapa sering isu Keamanan Maritim dibahas di IORA?*

I : *Cukup sering, namun isu tersebut dibawa untuk menjaga stabilitas kawasan yang mendukung perdangan dan ekonomi. Isu ini dibahas dalam IOD, IOD ketiga dilaksanakan di Padang dan keempat di Abu Dhabi.*

P : *Bagaimana hasil dialog di IORA dilaksanakan lebih lanjut?*

I : *Hasilnya akan disampaikan di Pertemuan Tingkat Menteri sebagai rekomendasi. Lalu yang penting adalah tindak lanjut dari Menteri setelah pertemuan tersebut.*

P : *Bagaimana posisi IONS sebagai mitra IORA?*

I : *Sampai saat ini belum ada tindak lanjut bermitra dengan IONS,*

memang bekerja sama secara lanjut dengan IONS belum jadi prioritas.

P : *Bagaimana hubungan IORA dengan negara diluar kawasan?*

I : *Mereka posisinya sebagai Dialogue Partner, ada 7 negara. Mereka cukup aktif dalam pertemuan formal PTM.*

P : *Mengapa IORA sulit untuk mengeluarkan kebijakan yang legally binding?*

I : *Cenderung sulit. Sejauh ini paling berupa communiqué pada PTM. Karena Concord ini pun tidak mengikat.*

P : *Bagaimana kepentingan Indonesia di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Hal ini mengacu pada Pernyataan Pers Tahunan Menlu tahun 2017, karena Indonesia berbatasan dengan Samudera Hindia jadi berkepentingan menjaga stabilitas kawasan karena akan berpengaruh ke nasional. Indonesia menganggap Samudera Hindia menjadi pusat pertumbuhan baru, melihat negara seperti India yang emerging. Indonesia juga memasukkan IORA pada RPJM 2019 sebagai salah satu fokus Indonesia di bagian prioritas dalam rangka memajukan kerjasama ekonomi.*

P : *Bagaimana strategi Indonesia untuk menjaga eksistensi di Samudera Hindia dan IORA?*

I : *Tetap mempertahankan fase, melakukan branch mark, dan melanjutkan program.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> H.E. Dr. Arief Havas Oegroseno, S.H., L.LM	<u>Jabatan:</u> Deputi I Kemenko Maritim
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> UGM Yogyakarta	<u>Waktu:</u> 9 Desember 2017 Pukul – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Bagaimana pendapat Bapak terkait peran IORA terhadap isu keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia? Melihat isu ini dijadikan salah satu isu prioritas.*

I : *Kurang. Kurang banyak. Sementara ini masih belum komprehensif. Keamanan itu kan isu baru (di IORA) dulu kan ekonomi. Kedua Samudera Hindia ini terdiri dari negara-negara dengan kemampuan pertahanan yang berbeda-beda. Jadi sulit untuk mengharapkan harus semua negara berperan. Tapi minimal dengan adanya kesepakatan di bidang maritime security, at least pada tingkat dialog itu sudah bagus. Karena dalam diplomasi mengadakan dialog merupakan suatu keberhasilan.*

P : *Apakah ada kemungkinan IORA bekerjasama dengan IONS dalam isu ini?*

I : *Itu kan sifatnya di luar IORA, itu gapapa jadi suatu arsitektur keamanan Samudera Hindia. Walaupun IONS juga hanya rapat, dialog, seminar. Bukan suatu kegiatan operasi bersama. Yang ada justru operasi bersama dari Resolusi Dewan Keamanan PBB. Indonesia bisa memainkan peran yang lebih besar dalam dialog. Ketiga faktanya tidak ada kota besar Indonesia yang berlokasi di Samudera Hindia. Hal ini signifikan karena kota-kota besar di negara lain menghadap ke*

Samudera Hindia. Karena tidak ada armada khusus yang posisinya di Samudera Hindia.

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Kementerian Pertahanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Analisa Strategis Kerjasama Organisasi Internasional	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> (1) Kol. Inf. Budi Kurniawan, S.IP, M.M (2) Letkol Sus. Samsul Bahari (3) Yuli Minanty Marwah (4) Martha Renni Ambarini (5) Moh. Nazar	<u>Jabatan:</u> (1) Kasubdit Anstra – Strahan Kemhan (2) Kasi Asia Barat, Subdit Asia Pasifik (3) Analis Pertahanan – Organisasi Internasional (4) Analis Pertahanan – Militer dan Keamanan Dalam Negeri (5) Analis Pertahanan – Keamanan Nasional Isu Global
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Kementerian Pertahanan RI	<u>Waktu:</u> Jumat, 27 Oktober 2017 Pukul 8.00 – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
 (I) : Informan (Anstra Kemhan)

P : *Mengapa Kemhan memandang IORA penting bagi Indonesia?*

I : *Focal Point Indonesia untuk IORA memang pada Kemlu, tapi Kemhan juga memandang isu ini strategis terlebih setelah Indonesia menjabat sebagai ketua.*

P : *Seperti apa posisi Kemhan dalam concern terkait IORA seperti apa?*

I : *Di Kemhan itu membahas isu keamanan dan pertahanan yang lebih politis ya, beda dengan Mabes TNI. Dalam konteks internasional, concern kita selama ini itu UN, ASEAN, organisasi pemerintah dan non pemerintah. Di Kemhan sendiri yang spesifik tentang IORA belum ada. IORA itu jadi concern kita sejak Indonesia sebagai ketua. Kemlu tidak melibatkan Kemhan secara khusus pada kegiatan Summit kemarin.*

IORA selama ini tidak ada membicarakan isu pertahanan, tapi seperti sudah mengarah kesana. Kami disini sifatnya mengkaji dan memantau.

P : *Bagaimana isu keamanan maritim diangkat di IORA?*

I : *Dalam isu keamanan maritim belum ada pergerakan yang jelas bahwa itu adalah kerjasama pertahanan bagi negara IORA. Kenapa, karena anggota IORA sangat beragam, ada yang angkatan lautnya sangat kuat ada yang sangat kecil. IORA juga melihat isu keamanan maritim penting untuk mendukung isu ekonomi. Kalau kawasan ini aman maka ekonomi stabil.*

IORA selama ini fokus ke ekonomi, membawa bendera blue economy. Untuk isu keamanan sendiri, dari inisiasi akan dilanjutkan di keketuaan selanjutnya, itu proses.

P : *Apakah bekerja sama dengan IONS akan menjadi langkah yang tepat untuk memaksimalkan isu keamanan maritim di kawasan ini?*

I : *IONS memang forum dialog, karena memang isinya tidak hanya militer, tapi juga ekspertis yang terkait dengan kemaritiman. IONS memang tidak di bawah IORA, mereka berjalan parallel.*

P : *Bagaimana peran negara besar di IORA?*

I : *India ingin menjadikan IORA sebagai alat untuk mendominasi kawasan, ajang eksistensi. Juga bantuan Australia terhadap IORA sangat besar. Hambatan lain karena latar belakang negaranegara lain akan menimbulkan ketergantungan terhadap negara besar dan negara besar ini dapat memainkan pengaruh di kawasan. Peran India dan Australia sangat penting dalam dominasinya, sedangkan Indonesia hanya sebagai stabilizer.*

Selain negara anggota, jangan lupa Cina juga berperan ke area ini. Termasuk juga Belt Road Initiative yang digagas juga menggunakan perairan Samudera Hindia.

P : *Bagaimana sebaiknya isu keamanan maritim dibahas di IORA?*

I : *Karena gap economy harus disadari menjadi hambatan nyata, ada*

usulan untuk membentuk minilateral dimana ini merupakan keunikan untuk bisa membahas isu-isu yang terjadi di kawasan dengan hanya melibatkan negara-negara yang secara langsung bersentuhan dengan isu tersebut. Namun kelemahannya akan less existence.

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> (1) Dr. Adriana Elisabeth (2) Dr. Riefqi Muna, M.DefStud	<u>Jabatan:</u> (1) Ketua IORA Focal Point Indonesia Bidang Akademis (2) Peneliti Senior LIPI dan Pemerhati IORA dan Hankam
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Meeting Room Harris Hotel Sentul	<u>Waktu:</u> Kamis, 19 Oktober 2017 Pukul 15.00 WIB – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I1) : Informan 1
(I2) : Informan 2

P : *Bagaimana kepentingan Indonesia dalam isu kepemimpinan di IORA?*

I1 : *Indonesia seharusnya bisa fokus untuk menjadi Sekjen IORA, Indonesia bisa punya kesempatan karena nanti lebih mudah mengatur. Tapi kita tidak cukup konsisten, sudah jadi Ketua, sekarang sudah hand over ke Afrika Selatan, harusnya kita bisa ambil bagian dengan Sekjen di Secretariat. Tidak berhenti di sini. Saya tidak yakin kita akan take care of ini terus (sustain).*

P : *IORA Concord menjadi dokumen pertama yang dihasilkan IORA setelah IORA Charter selama 20 tahun berdirinya organisasi ini, apakah Jakarta Concord ini juga dimasukkan kepentingan Indonesia saat menjadi ketua?*

I1 : *Concord ini sebagai pengingat kembali apa tujuan dan mempererat solidaritas dari negara IORA. Indonesia ada dua tujuan, kita punya kepentingan dan mau berkontribusi. Makanya di Concord ini sebisa mungkin untuk diolah menampung kepentingan regional yang juga inisiatif Indonesia.*

Dalam penyusunan ini, semua Kementerian (Indonesia) diundang

Kemlu, termasuk LIPI. Tetap leading sektornya Kemlu (HPI).

P : *Dari Jakarta Concord (policy) penurunan ke bentuk strategi dan implementasi seperti apa?*

I1 : *Belum. Saya tidak tau setelah Indonesia tidak jadi Ketua entah. Karena nanti ketika ganti Ketua mereka punya kepentingan sendiri yang sudah di propose sebelum menjadi Ketua. Sangat mungkin hal itu yang diutamakan saat mereka menjabat.*

I2 : *IORA Concord bukan Indonesian Policy, tapi Indonesian initiative to IORA yang di nasional posisinya strategic policy. Jadi IORA Concord ini policy milik region.*

P : *Mengapa baru di 2017 IORA membuat Summit setingkat KTT?*

I1 : *Iya itu salah satu ide Indonesia, itu juga salah satu cara menunjukkan kita sebagai Ketua. Tapi sayangnya bahkan di level nasional banyak yang belum aware tentang IORA. Waktu itu kebetulan Poros Maritim, kebetulan di IORA ada bahas maritim, tapi belum ada kejelasan apa sih yang diinginkan isu maritim di IORA.*

I2

Indonesia saat menjadi Ketua sudah sangat bagus, untuk membuat IORA memiliki Summit. Tapi kurang dipikirkan setelah itu apa. Padahal langkah awal sudah sangat baik, misalnya setelah itu harusnya kita bisa mencalonkan orang kita untuk menjadi Sekjen. Itu bisa menjadi bukti konsistensi kita dalam regional diplomacy. Jangan seperti event organizer saja. Isu sustainable leadership ini sulit.

P : *Apakah IORA sendiri kurang menggandeng negara anggotanya?*

I1 : *Sebenarnya yang menyebabkan itu economy gap yang sangat tinggi dan masalah nasional masing-masing; lalu mitra IORA adalah negara maju apakah bisa sebanding dengan IORA? Jadi sebetulnya pertemuan IORA ini bisa bermanfaat bagi negara IORA. Berat ini. Jadi isu ekonomi itu yang diutamakan untuk mendukung isu lain.*

P : *Apa yang harus dilakukan IORA untuk dapat melangkah / berkembang*

seperti organisasi regional lain?

I1 : *Mengurangi economy gap. Ini satu-satunya yang harus diperbaiki dengan teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Kalau tidak nanti tidak ketemu-ketemu, kalau tidak bisa seluruhnya bisa dilakukan sub-regional. Di Samudera Hindia belum banyak kerjasama, harus bisa dicari isu kongkrit dimana semua negara lebih bisa kongrit. Karena sekarang itu cuma meeting, setiap negara mereport ini yang sudah ini yang belum, tidak ada diskusi. Kalau mau diskusi lebih harus ada forum lain, namun belum banyak inisiatif tentang itu.*

P : *Terhadap isu keamanan mariitm, bagaimana konsentrasi IORA dalam hal tersebut?*

I1 : *Di negara anggota sendiri masih ada perbedaan pandangan tentang isu keamanan dan keselamatan maritim. Ada yang menganggap sama, ada yang beda. Di IORA sendiri belum mendefinisikan secara khusus term tersebut.*

I2 : *Hanya dalam statement pertemuan di Australia, term maritime security and safety itu satu.*

P : *Setelah selesai menjabat sebagai ketua, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah?*

I1 : *Harus maintain juga, dilihat lagi apakah Indonesia mengambil isu maritim ini memang prioritas nasional harusnya bisa difokuskan. Bisa saja per region fokusnya. Di Indonesia ini kurang ada pemikir yang fokus ke region, jadi bisa memikirkan Indonesia di region ini berapa tahun kedepan seperti apa. Jadi kalau IORA ini menjadi salah satu pilihan kawasan harus di follow up, bukan hanya setelah jadi ketua selesai.*

P : *Keamanan maritim di Samudera Hindia banyak terjadi piracy, armed robbery, dan lain. Menurut Bapak bagaimana kondisi kawasan itu?*

I2 : *Level of threats nya beragam. Satu tingkatannya strategic maritime security (military issues – navy), kedua sub-strategic maritime security atau non-tradisional isu maritim termasuk trans-national organized crime*

yang menggunakan laut sebagai dimensi pengantar kegiatan security itu. Belum lagi isu safety, pelayaran, komunikasinya. Lalu yang di high seas kan lebih ke arah isu kekuatan negara siapa yang bisa sampai sana, adanya juga isu lain.

P : *Sejauh ini bagaimana IORA menjalankan isu keamanan maritim?*

I2 : *Selalu dibicarakan, its topical di IORA. Masalahnya adalah pada tingkatan kerjasama untuk penenaganan maritime security belum properly initiated. Sifatnya masih kerjasama bilateral tidak dibawah payung IORA. Tapi IORA sudah membicarakan dan mari bekerjasama untuk ini. Levelnya talkshop. Karena Indian Ocean kan ada IONS. Yang bisa saja bekerja sama dengan IONS yang sudah berjalan, daripada membuat sendiri dari awal karena kondisi beberapa negara yang ekonominya sangat kecil, bahkan untuk datang rapat saja harus fully funded. IORA harus punya mekanisme untuk itu. IORA sudah aware tapi masih di tingkat narasi, talkshop.*

P : *Bagaimana kepentingan Indonesia terhadap kondisi keamanan maritim di Samudera Hindia?*

I2 : *Masing-masing negara punya concern, Indonesia pun punya concern tinggi terhadap keamanan di kawasan ini. Problem kita adalah deployment aset angkatan laut kita masih lebih banyak fokus kepada timur utara, dan Armabar pun jangkauannya belum sampai ke Samudera Hindia jauh. Sedangkan di kawasan Samudera Hindia sebelah timur juga sangat dinamis, tapi kita belum kesana. Tapi kita juga memiliki keterkaitan karena beberapa kapal kita pernah dibajak, jadi waktu terjadi itu baru terlihat.*

P : *Di tingkat nasional apakah Kemlu sudah melibatkan stakeholders nasional?*

I2 : *Sudah. TNI AL sudah, Hidros, Bakamla.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> TNI Angkatan Laut	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Kolonel Laut (P) Erwin Slamet Aldedarma	<u>Jabatan:</u> Paban 5 Asisten Operasi KASAL
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Markas Besar TNI Angkatan Laut	<u>Waktu:</u> 18 Desember 2017 Pukul 14.00 WIB – selesai

Keterangan:

(P) : Peneliti

(I) : Informan

P : *Bagaimana kondisi keamanan kawasan Samudera Hindia?*

I : *Secara global tantangan keamanan di kawasan Samudera Hindia berasal dari kondisi ekonomi dan politik negara-negara di kawasan tersebut, termasuk di dalamnya keamanan maritim. Sebagai contoh perompak Somalia, kejadian ekstrimis dan teroris di Teluk Aden dan Yaman yang merupakan akses dari kekacauan di dalam negeri. Tidak hanya negara kawasan tetapi juga untuk menjaga keamanan kapal dagang yang menjadi salah satu kepentingna nasionalnya dengan pembentukkan Satuan Tugas multinasional seperti CTF 151, CTF 150 yang sampai dengan saat ini masih terus beroperasi. Secara umum keamanan maritim di Samudera Hindia terutama di sisi barat lautnya cukup rawan. Secara nasional, di pantai barat Sumatera dan selatan Jawa sangat jarang terjadi insiden karena memang bukan jalur lintas kapal dagang dan minyak yang ramai. Namun TNI AL tidak mengurangi kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan antisipasi terhadap berbagai ancaman yang potentially terjadi.*

P : *Bagaimana TNI AL melihat kawasan mana yang dijadikan prioritas?*

I : *Kami melihat trend dengan juga melakukan prediksi menggunakan data intelijen. Selain kawasan hal tersebut juga digunakan untuk menganalisa negara lain. Di Samudera Hindia bisa jadi BRI menjadi potensi ancaman atau potensi mitra. Begitu juga kehadiran super power seperti Cina, Amerika dan India di Samudera Hindia juga patut dilihat dan dikaji apakah merupakan potensi ancaman bagi Indonesia.*

P : *Bagaimana urgensi membangun integrasi antara IORA dan IONS untuk*

mencapai keamanan maritim di Samudera Hindia?

I : *Konteks IORA berada pada level dan cangkupan yang luas dibanding IONS. IORA merupakan langkah kerjasama negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya di Samudera Hindia, sedangkan IONS berada pada tataran operasional dan taktis di lapangan khususnya yang menjadi tugas keangkatanlautan secara universal.*

P : *Seberapa penting membentuk kebijakan keamanan kawasan dengan menggandeng IONS dan negara lain diluar IORA?*

I : *Usaha yang menyelesaikan tantangan keamanan maritim dalam bentuk kerjasama multilateral sampai saat ini adalah cara yang paling relevan dan efektif/ hal ini sangat penting dalam menanggulangi bentuk ancaman yang semakin kompleks, dinamis, dan lintas negara.*

P : *Bagaimana peran TNI AL dalam proses Indonesia menyisipkan kepentingan menjaga keamanan kawasan Samudera Hindia dalam penyusunan Jakarta Concord?*

I : *Peran TNI AL sifatnya adalah pelaksana dari apa yang menjadi kebijakan luar negeri Indonesia. TNI AL selalu pro aktif dalam berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kemlu sebagai pedoman operasional dan diplomasi sesuai tugas TNI AL dalam UU No.34/2004 tentang TNI.*

P : *Bagaimana kemampuan Indonesia menjaga keamanan dan kedaulatan ruang maritimnya di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Keamanan laut merupakan tanggung jawab bersama berbagai instansi pemerintah baik sipil maupun militer, sedangkan kedaulatan menjadi tanggung jawab penuh dari TNI. TNI AL telah membangun program jangka panjang dengan tujuan mencapai MEF untuk pembangunan kekuatan berdasarkan capability based. Samudera Hindia juga merupakan salah satu wilayah yang senantiasa dijaga.*

P : *Apakah sejauh ini TNI AL dilibatkan dalam diskusi keamanan maritim di Smaudera Hindia oleh Kemlu?*

I : *Pelibatan TNI AL dalam diplomasi maritim berdasarkan pada pandangan dan keperluan dari Kemlu, hal tersebut berhubungan dengan*

profesionalisme dan tugas TNI AL, selama ini Kemlu selalu meminta pertimbangan, masukan, dan sarana dalam bentuk tertulis maupun sebagai salah satu delegasi dalam pertemuan.

P : *Apa harapan TNI AL terhadap kondisi keamanan maritim kawasan ini?*

I : *Kedaulatan dan keamanan maritim kawasan tersebut dapat terjaga stabilitasnya sampai dengan tingkat minimal terendah adanya insiden.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> TNI Angkatan Laut	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Letkol Laut (P) Arif Rahman	<u>Jabatan:</u> Ban 1 Asisten Perencanaan KASAL
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Markas Besar TNI Angkatan Laut	<u>Waktu:</u> 07 November 2017 Pukul 15.00 WIB – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Apakah saat ini dari TNI AL khususnya Bagian Perencanaan TNI AL ada perhatian khusus terhadap keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Untuk perhatian khusus tidak ada. Saat ini proses perencanaan yang kita laksanakan yaitu capability based training berdasarkan threat based planning dari data intelijen. Untuk ancaman yang saat ini paling rawan di antara hotspot yang ada di Indonesia, yang pertama di Utara (Natuna), kedua selatan (Australia), ketiga tengah (Ambalat). Khusus di Samudera Hindia itu sendiri kita tahu sangat luas, kejahatan yang terjadi paling tren tidak terjadi di dekat Indonesia, sebagian besar di sekitar Afrika yang tingkat kesejahteraan rendah. Data terakhir keamanan yang terjadi di Samudera Hindia dekat Indonesia cenderung aman. Kejahatan yang terjadi tidak di tengah Samudera namun di pinggiran. Saat ini TNI AL tidak ada perhatian khusus namun tetap memantau karena itu adalah batas wilayah Indonesia.*

Namun kita tetap melaksanakan patroli terkoordinasi dengan India, Thailand, dan Australia (di kawasan Samudera Hindia) untuk memberikan standar keamanan bagi Indonesia di perairan sekitar Samudera Hindia.

P : *Bagaimana TNI AL memandang pentingnya IORA membahas isu keamanan maritim?*

I : *Kalau kita melihat latar belakang IORA yang awalnya bicara ekonomi, dimana ekonomi juga dipengaruhi oleh isu keamanan maka dari itu isu maritime security juga penting untuk mengamankan jalur pelayaran*

tersebut, memberikan jaminan keamanan yang mana itu tugas AL. Saya kira kedepannya lebih baik, yang awalnya hanya bicara ekonomi namun setelah dipimpin India mulai membicarakan keamanan.

P : *Bagaimana ketimpangan latar belakang dari negara di IORA berpengaruh terhadap keamanan maritim kawasan?*

I : *Pertama harus mempunyai persamaan persepsi, keamanan maritim harus seperti apa. Lalu harus menyatukan confidence dimana ada yang mampu dan kurang, bisa subsidi silang negara yang memiliki AL yang besar dapat membantu negara yang kurang. Namun kadang hambatannya karena dalam perencanaan operasi AL di awal harus menghitung operasinya, dan kondisi Samudera Hindia yang sangat luas menjadi hambatan bagi sebagian negara anggota IORA untuk bisa beroperasi secara besar di kawasan. Namun apabila bisa dibuat satu konsep operasi secara regional (pola operasi) yang dapat melibatkan semua namun bisa diatur kapasitasnya, kedepannya bisa sangat terkoordinasi. Bisa juga bantuan dalam bentuk memberikan pelatihan atau hibah kapal.*

Karena negara maju akan berpikir kalau jalur perekonomiannya aman, mereka akan mencurahkan perhatian untuk hal tersebut. Misalnya Amerika memberikan kapal atau pelatihan ke negara yang jalurnya digunakan kapal lalu lintas Amerika maka mereka tidak perlu turun langsung karena negara tersebut sudah dapat mengamankan jalurnya. Hal ini akan berdampak ke Amerika itu sendiri.

P : *Apakah ada kemungkinan IORA dan IONS bekerja sama?*

I : *Sangat mungkin, karena mereka berada di kawasan yang sama dan negara anggotanya hampir sama.*

P : *Apa kepentingan Indonesia menjaga keamanan maritim di Samudera Hindia?*

I : *Kawasan itu sangat ramai dilalui kapal, Indonesia yang berbatasan dengan kawasan itu juga berkontribusi memberikan jaminan keamanan yang melewati jalur terutama yang di sekitar Indonesia.*

P : *Apakah TNI AL sudah dilibatkan dalam kegiatan diplomasi maritim*

terutama di kawasan Samudera Hindia oleh Kemlu?

I : *Secara Samudera Hindia secara spesifik yang paling utama dilibatkan pada isu perbatasan. Dengan Kemlu, ada beberapa pakar yang mumpuni, sampai sekarang hanya sebatas dialog untuk memberi pandangan. Kita pernah mengikuti beberapa kegiatan, contohnya AMAN Exercise di Pakistan.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> -	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Prof. Hasjim Djalal	<u>Jabatan:</u> Pakar Maritim dan Diplomasi Indonesia
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Hasjim Djalal Office Sudirman	<u>Waktu:</u> Senin, 31 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Apakah Samudera Hindia merupakan salah satu kawasan penting bagi Indonesia?*

I : *Kalau dilihat dari segi itu kita sudah lama sekali memusatkan perhatian ke Samudera Hindia. Bahkan dari 1955 Indonesia sudah memikirkan masalah Samudera Hindia, tapi tidak konsisten. Seperti IORA ini, mula dibentuk dalam bentuk IOR-ARC, saya masih aktif di Kemlu waktu itu. Kita pernah bikin Pusat Studi Samudera Hindia di Andalas, namun lalu hilang. Di Hasanudin pernah ada Pusat Studi Samudera Pasifik, lalu hilang.*

Pada waktu itu tema pokok kita masalah keamanan memang, bagaimana menangani prospek bajak laut. Perlu ada kerja sama dengan negara-negara pantai, namun IOR-ARC tidak berfungsi. Sampai hari ini saya kecewa tidak ada perhatian Indonesia, yang ada perhatian India, Korea Selatan, dan Cina (terhadap Samudera Hindia).

Terakhir kita lihat Presiden kita punya fokus maritim, berarti Indonesia punya fokus ke Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan laut-laut lain. Tapi kemudian tidak terdengar lagi juga. Indonesia harusnya berperan positif dalam Samudera Hindia apalagi dengan Poros Maritim. Kita di tengah-tengah.

Indonesia tidak terlalu terlihat encourage akademisnya untuk isu pertahanan dan keamanan Indonesia terlebih di perbatasan dengan Samudera Hindia.

P : *Bagaimana Kemlu berperan sebagai Focal Point dari segala urusan luar*

negeri Indonesia? Terutama dalam hal tersebut?

I : *Justru Kemlu harus mempelajari lebih banyak mengenai Samudera Hindia. Saya kecewa sekali karena perhatian itu timbul tenggelam, salah satunya dengan menghidupkan kembali Pusat Studi Samudera Hindia itu.*

P : *Selain perhatian Indonesia yang timbul tenggelam, IORA pun selama 20 tahun juga demikian. Mengapa demikian?*

I : *Salah satu masalah IORA adalah konflik antara India dan Pakistan. India tidak ingin Pakistan masuk dalam IORA. Hal ini agak sedikit menghambat kerjasama kawasan. Kedua adalah konsekuensi dari kerjasama ASEAN dengan SAARC. Yang aktif sekali adalah Australia. Jadi ada negara yang aktif sekali, ada yang tidak.*

P : *Apakah sifat dokumen IORA yang hanya morally binding berpengaruh?*

I : *Mengikat dan tidak mengikat itu masalah hukum, bagi saya IORA adalah forum politik bagi negara-negara Samudera Hindia. Masalahnya bagaimana pemerintah Indonesia bisa mengembangkan itu? Konsekuensinya banyak orang tidak paham, IORA itu apa.*

P : *Bagaimana potensi IORA dan IONS bekerja sama dalam isu keamanan maritim?*

I : *Bisa saja namun Menemukan kesamaan persepsi keamanan itu penting.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> -	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Laksamana TNI (Purn.) Dr. Marsetio, M.M	<u>Jabatan:</u> Pakar Keamanan Maritim dan Organisasi Kemaritiman Internasional
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Kementerian Perhubungan RI	<u>Waktu:</u> Kamis, 5 Oktober 2017 Pukul 14.00 WIB – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Bagaimana Bapak melihat peran dari organisasi regional ini (IORA) dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Jadi yang pertama kita harus melihat letak geografis Indonesia, terletak di antara dua benua dan dua samudera yang sangat strategis. Indonesia punya ide bahwa kita menyatu WPNS, kita juga melaksanakan pada IONS, yang kita lakukan pada International Maritime Security Symposium. Jadi kalau terkait IORA, walau dikenal sebagai India pasti dianggap berperan, harusnya dengan diadakan IORA di Indonesia kita bisa berperan di luar negeri. Saya sempat hadir sebentar, tapi ini kok hanya sekedar lewat saja. Artinya peran diplomasi maritim Indonesia, dengan adanya IORA ini harusnya bisa menjadi sebuah wadah untuk lebih bisa memerankan, tidak hanya di ASEAN sekarang sekretariat ASEAN ada di Jakarta. Tapi bagaimana IORA ini dapat berkembang dan kita menjadi motor penggerak dan leader. Nah ini belum. Perlu adanya pemerintah lebih bergerak agar IORA ini dapat menjadi tombak untuk lebih mengeksistensikan Indonesia di dunia.*

P : *Kalau dilihat dari segi keamanan maritim regional, ancaman keamanan maritim yang paling urgent terjadi ke kawasan Samudera Hindia sendiri itu apa?*

I : *Mungkin kalau kejahatan, tidak sejauh di Laut Cina Selatan. Samudera Hindia ini sekarang menjadi rebutan, India ingin memiliki, Cina ingin memberikan pengaruh. Semua pantai di Samudera Hindia itu semua ingin*

dikuasai oleh Cina. Kita harusnya menjadi penyeimbang.

P : *Apakah IORA harus menggandeng IONS dalam mewujudkan keamanan maritim di kawasan Samudera Hindia?*

I : *Iya jadi sebenarnya ide saya itu. Ide saya kita menjadi penyeimbang, jadi apa makna Indonesia berada di dua benua dan dua samudera? Selama ini kan tidak pernah tersentuh, harusnya kita sentuh ini IORA. Harusnya TNI AL lebih mengambil profit dari maritime security di kawasan Samudera Hindia ini. Selama ini belum.*

P : *Apakah Bapak sepakat bahwa IORA sama sekali tidak berperan dalam keamanan maritim kawasan?*

I : *Kalau menurut saya sekecil apapun dia berperan.*

P : *Karena Bapak berpengalaman dalam organisasi internasional bidang maritim, sebetulnya bagaimana agar keluaran hasil dari pertemuannya menjadi legally binding dan dapat diimplementasikan oleh anggotanya agar tidak hanya sekedar bertemu?*

I : *Perlu keaktifan. Harusnya dipertemuan selanjutnya ada momentum. Diplomacy lift service adalah momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan keaktifan. Peran diplomasi Indonesia untuk menjadi regional leader dan IORA bisa jadi tombak untuk mengeksiskan diri di regional.*

DATA INFORMAN	
<u>Instansi:</u> Pengamat	<u>Fungsi:</u> Regulator / Operator / Pengamat
<u>Nama:</u> Laksamana Muda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D	<u>Jabatan:</u> Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut
KETERANGAN WAWANCARA	
<u>Lokasi:</u> Universitas Pertahanan	<u>Waktu:</u> 10 November 2017 Pukul 10.00 – selesai

Keterangan:

- (P) : Peneliti
(I) : Informan

P : *Bagaimana penilaian Bapak sebagai TNI AL yang serng terlibat mewakili instansi dalam kegiatan IORA, faktor apa yang menjadi penghambat tindak lanjut dari hasil keluaran forum IORA?*

I : *Pertama, tidak ada konsep IORA menggandeng IONS, mereka jalan sendiri-sendiri. Mereka beranggapan IORA berjalan di ekonomi, tidak di pertahanan keamanan. Beda dengan ASEAN yang semua jadi satu. Kedua, tidak ada mekanisme yang mengatur bagaimana melakukan dialog dengan benar dan tindak lanjutnya bagaimana. Di IORA dialog ya dialog saja, tidak ada mekanisme misalnya hasil dialog isu keamanan diberikan kepada IONS, atau organisasi lain yang relevan. Ketiga, tidak ada mekanisme kerjasama dengan organisasi atau negara di luar IORA, misal dengan EU atau ASEAN. Mereka seolah-olah hanya berdialog dengan sesama. Keempat, tidak bisa mengidentifikasi collective interest. Misalnya kepentingannya ekonomi, dalam mencapai ini kan harus aman dari berbagai ancaman gangguan, tapi tidak sampai kesana. Misalnya dalam IUU Fishing, mereka tidak terbuka kendala sebenarnya apa atau siapa. Misalnya aktor dari IUU Fishing itu trans national organize crime, yang ditakutkan pelakunya state actor. Itu yang kadang segan. Misalnya pelakunya Armada Jepang, tapi banyak disana kerja sama dengan Jepang, atau Armada Cina tapi mereka banyak yang ikut OBOR atau BRI. IORA ini tidak punya posisi politik yang sama dengan negara super power.*

P : *IONS dianggap juga masih sama berbentuk symposium, makanya tidak dihaapkan lebih untuk bekerja sama dengan IORA dalam isu keamanan*

maritim. Bagaimana pendapat Bapak?

I : *Tidak. IONS itu namanya saja symposium. Tapi mekanismenya sama seperti WPNS. Di dalam IONS atau WPNS itu ada produk-produknya. Misalnya di WPNS ada CUEST. IONS produknya membuat aturan untuk patroli, misalnya India – Indonesia diatur polanya dari hasil IONS. Jadi pada waktu IONS ada kesempatan bilateral meeting yang bisa ditindaklanjuti setelah itu. IONS juga menghasilkan rekomendasi untuk menghasilkan joint exercise, misalnya MILAN Exercise.*

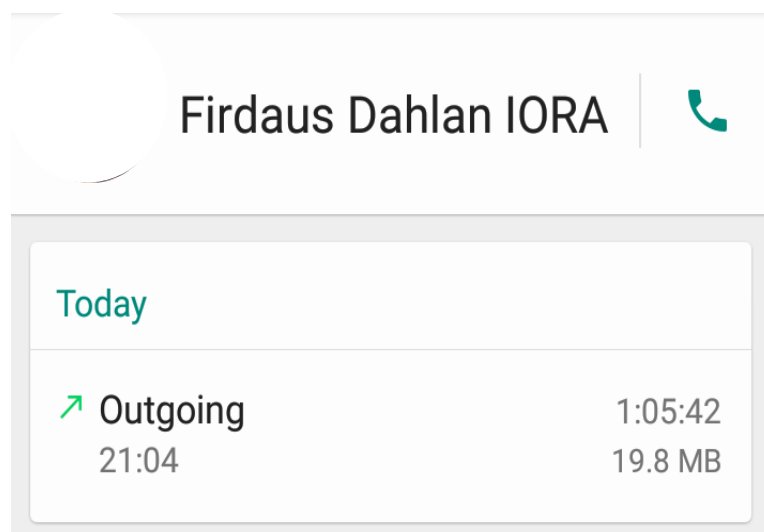
P : *Ketika hasil dokumen IORA hanya dalam bentuk meeting report, atau yang dari KTT kemarin ada dalam Action Plan dimana untuk isu keamanan maritim hanya fokus pada SAR tidak ada fokus untuk keamanan maritim spesifiknya. Apakah mungkin mereka mengeluarkan kebijakan lain di luar Action Plan itu sendiri?*

I : *SAR itu salah satu rekomendasi dari Jakarta Concord bisa saja bagian dari keamanan maritim. SAR bisa jadi untuk mengantisipasi ilegal imigran. Itu bisa jadi kerjasama keamanan maritim yang bisa ditindaklanjuti. Indonesia ini harusnya bisa banyak menghasilkan banyak inisiatif dari meeting report. Sayangnya karena kebijakan luar negeri kita tidak fokus ke Samudera Hindia maka inisiatif-inisiatif Indonesia kurang. Kalau ada yang diluar Action Plan bisa jadi agenda usulan. Yang bisa digarisbawahi itu hasil IORA tidak didistribusikan ke stakeholder Indonesia sehingga tidak melahirkan inisiatif dan tindak lanjut. Disana bisa mengukur inisiatifnya sejauh apa. Kemlu harus lebih aktif, apa tindak lanjutnya? Kita tidak punya mekanisme tindak lanjut meeting report IORA.*

SAR ini harusnya bisa diatur, bagaimana komunikasinya, pola pencarian seperti apa. Kalau ini bisa diatur, AL di Samudera Hindia bisa diatur maka bisa digunakan untuk menghadapi yang lain. Misalnya latihan SAR bersama, dengan mekanisme yang sama bisa dilakukan untuk menanggulangi isu keamanan maritim lain dengan memodifikasi mekanisme dari latihan SAR bersama ini. Nah disini peran Kemlu untuk follow up inisiatif seperti ini, jangan dibiarkan saja. Karena Kemlu merasa

dari IORA itu tidak perlu diaksi karena tidak binding, just talk. Menurut saya kalau bisa diaksi mengapa tidak.

LAMPIRAN 4: DOKUMEN PENDUKUNG



Wawancara: *Online interview* Direktur IORA Secretariat
(Indonesia – Mauritius)



Wawancara: Kementerian Luar Negeri RI



Wawancara: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



Wawancara: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia



Wawancara: Kementerian Pertahanan RI



Wawancara: Laksamana TNI (Purn.) Dr. Marsetio



Wawancara: Prof. Hasjim Djalal



Wawancara: Staff Operasi TNI AL



Wawancara: Staff Perencanaan TNI AL

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Megawati Rosalio Putri lahir di Denpasar pada 08 Februari 1994. Anak tunggal dari pasangan Ir. Leo Agustin dan (Almh.) Roslaini menyelesaikan pendidikan SDN Wandanpuro II Bululawang lulus tahun 2006, SMPN 7 Denpasar lulus tahun 2009, SMAN 3 Denpasar lulus tahun 2012, Sarjana (S1) President University – Fakultas Humaniora, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Konsentrasi Pertahanan Strategis lulus tahun 2016, dan pada tahun 2016 melanjutkan program Magister (S2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini menjabat sebagai Duta Maritim Indonesia di bawah naungan Yayasan Putera Puteri Maritim Indonesia (PPMI) milik Ibu Anna Tedjo Eddy. Peneliti aktif dalam kegiatan pemberdayaan pemuda dan merupakan *Co-Founder* dari Youth Corps Indonesia.

Dalam beberapa kesempatan Peneliti menjadi pamarar ilmiah dalam tingkat nasional dan internasional, antara lain 2014 di Burgos, Spanyol pada acara *International Youth Nuclear Congress*, 2016 di Yogyakarta pada acara Seminar Nasional Maritim, 2017 di Kobe, Jepang pada acara *Asian Congress on Asian Studies*, serta 2017 di Yogyakarta pada acara Kongres Maritim II.

Karya tulis atau buku yang pernah ditulis antara lain (2016) *'The Power Balance in Central Asia: The Strategic Partnership of Russian Federation with Republic of Kazakhstan (2010-2014)'* dalam *AEGIS Journal of International Relations Vol.1*; (2016) *'Diplomasi Maritim: Memaksimalkan IORA dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Maritim Indonesia di Kawasan Samudera Hindia'* dalam Buku Kembali Melaut: Visi Poros Maritim Dunia terbitan Kemenko Maritim; (2017) *'Strategic Outlook for the Indian Ocean: The Role of IORA in Ocean Governance and in Maintaining Regional Maritime Security'* dalam *IAFOR Conference Proceedings on Global Realities: Precarious Survival and Belonging*. Saat ini Peneliti terlibat sebagai kontributor *Journal of Indian Ocean* terbitan *Routledge* yang direncanakan terbit pada Juli 2018.